

DOI: [10.59330/jai.v1i1.3](https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.3)

JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial

AleK Murtin* | Safira Indah Rahmawati

AFILIASI:

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

*KORESPONDENSI:

alek@umy.ac.id

HISTORI ARTIKEL

Diterima:

7 September 2022

Direvisi:

8 Oktober 2022

Disetujui:

15 Desember 2022

Abstrak:

Latar Belakang: Permasalahan terkait rendahnya kinerja pemerintah daerah masih menjadi topik yang hangat. Rendahnya angka serapan anggaran menjadi indikator kurang optimalnya pencapaian tujuan yang dirumuskan. Penelitian ini menekankan pentingnya organisasi untuk memahami indikator yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial seperti akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi.

Tujuan: Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria responden yang terdiri dari Kepala Badan/Dinas/Kantor, Kepala bagian/bidang/subdinas/, Kepala subbagian/subbidang/ seksi dan Sekretariat/sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang. Lebih lanjut, pengujian hipotesis dilakukan dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Disisi lain, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini merupakan hasil replikasi penelitian Melia dan Sari (2019) dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variable independen. Selain itu, penelitian dilakukan dengan lokasi, waktu dan populasi yang berbeda.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik; Sasaran Anggaran; Partisipasi Anggaran; Komitmen Organisasi; Kinerja Manajerial

SITASI: Murtin, A. & Rahmawati, S.I. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1), 17-28.

Pendahuluan

Kinerja dapat dimaknai sebagai representasi seberapa tingginya keberhasilan program atau kebijakan berdasarkan tujuan, visi misi, dan sasaran organisasi yang umumnya tertuang dalam rencana strategis organisasi (Amir dkk. 2021). Secara spesifik, organisasi pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik agar tujuan pemerintah dapat tercapai (Tampubolon & Basid, 2019). Ironisnya, capaian kinerja pemerintah

Kabupaten Magelang baik secara keuangan dan fisik masih jauh dari target. Berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) diketahui bahwa skor AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2018 berada di angka 59,05 dengan kategori CC, sedangkan pada tahun 2019 ada sedikit peningkatan yakni 60,10 dengan kategori (B) (LKJIP, 2020). Disisi lain, realisasi anggaran Kabupaten Magelang ada tahun 2020 mencapai 73,66% dengan klasifikasi sedang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, serapan anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 2,38% (BPPKAD, 2020). Secara eksplisit, hal ini mengindikasikan bahwa indikator-indikator dalam penilaian masih banyak yang belum terpenuhi secara optimal.

Kinerja manajerial merupakan kunci dari keberhasilan perangkat daerah (SKPD) dalam menjalankan tugasnya (Melia & Sari, 2019). Sofyani dan Ardiyanto (2022), menafsirkan kinerja manajerial sebagai kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, kepegawaian, negosiasi, representasi, dan kinerja secara keseluruhan. Indikator kinerja sendiri meliputi penilaian kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*) (Setyoko & Kurniasih, 2022). Dalam lingkup sektor publik, kinerja manajerial merupakan proses berkelanjutan dalam penetapan dan pemenuhan tujuan dan sasaran organisasi. Beberapa peneliti meyakini bahwa ketika perencanaan strategis dan pemantauan dilakukan dengan baik maka akan mengarah pada keputusan manajemen yang lebih baik dan peningkatan kinerja (Beer et al., 2019).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja salah satunya yaitu akuntabilitas publik (Febria dkk., 2021). Akuntabilitas publik berkaitan dengan tugas seorang *agent* untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan juga aktivitas yang menjadi kewajibannya kepada masyarakat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Jatmiko, 2020). Akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa tugas yang dilakukan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tidak ada pemborosan yang dapat mempengaruhi sumber daya publik (Syah, 2021). Selain itu, pertanggungjawaban pada pelaporan keuangan pemerintah berfokus pada apakah dana yang didapatkan dibelanjakan sesuai dengan anggaran awal dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Melia & Sari, 2019). Adanya akuntabilitas publik mampu mendorong kinerja manajerial karena makin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan, maka akan makin baik pula kinerja dalam mencapai tujuan organisasi (Rossi, 2019).

Disamping itu, faktor lain yang mempengaruhi kesenjangan kinerja manajerial adalah kejelasan sasaran anggaran. Sasaran anggaran yang jelas dapat mempermudah perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan kegagalan ataupun keberhasilannya dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan (Precilia & Mimba, 2020). Semakin jelas sasaran anggaran suatu instansi, maka semakin mudah instansi tersebut dalam mempersiapkan strategi pencapaian tujuannya (Mulya & Fauzihardani, 2022). Lebih lanjut, apabila penetapan sasaran anggaran dijabarkan dengan jelas dan spesifik, maka pelaksana anggaran dapat menentukan dan merumuskan target serta strategi sehingga tujuan dapat terealisasi dengan baik (Suryani & Pujiono, 2020). Melalui kejelasan sasaran anggaran, pemerintah dapat memprioritaskan dan menetapkan rencana, program, dan kebijakannya sesuai batas kemampuan keuangan dan kondisi ekonominya (Lorenzo dkk., 2021). Artinya semakin jelas dan spesifik sasaran anggaran maka semakin baik kinerja manajerial aparatur daerah dalam mencapai tujuan organisasi (Harianto et al., 2021).

Aspek lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial adalah partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran merupakan instrument yang penting dalam mempengaruhi efektivitas perencanaan strategis dalam pemerintah daerah (Kempa & Kozłowski, 2020). Partisipasi anggaran menggambarkan sejauh mana aparat daerah terlibat dalam penyusunan anggaran (Suryani & Pujiono, 2020). Keterlibatan tersebut dapat membuat aparat Pemda lebih memahami alokasi anggaran dengan baik dan secara tidak langsung

hal ini akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih optimal (Hariani & Alamsyah, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, keterlibatan aparat daerah dalam proses penyusunan anggaran dapat berdampak secara signifikan terhadap kinerja manajerial di pemerintah (Yuliansyah dkk., 2019). Lebih lanjut, partisipasi dalam penganggaran dapat menjadi sebuah pendekatan yang handal dalam memajukan kinerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas sebuah organisasi (Fuadah dkk., 2020).

Dalam melaksanakan program atau kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, setiap aparatur pemerintah harus memiliki komitmen organisasi (Jatmiko dkk., 2020). Komitmen organisasi erat kaitannya dengan tingkat keterlibatan seseorang dengan organisasi tempat mereka bekerja (Tampubolon & Basid, 2019). Manajer yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan termotivasi untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam penyusunan anggaran sehingga akan meningkatkan kinerja manajerialnya (Handayati & Safitri, 2020). Lebih dalam, Cantika dkk. (2021) menyatakan bahwa jika seseorang memiliki komitmen dalam pencapaian tujuan tertentu maka komitmen tersebut telah tertanam dalam dirinya dan akan mempengaruhi tindakannya (Handayati & Safitri, 2020). Dengan demikian, komitmen organisasi merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan organisasi dan secara tidak langsung memotivasi mereka untuk mencapai tujuan organisasi (Augustine, 2022).

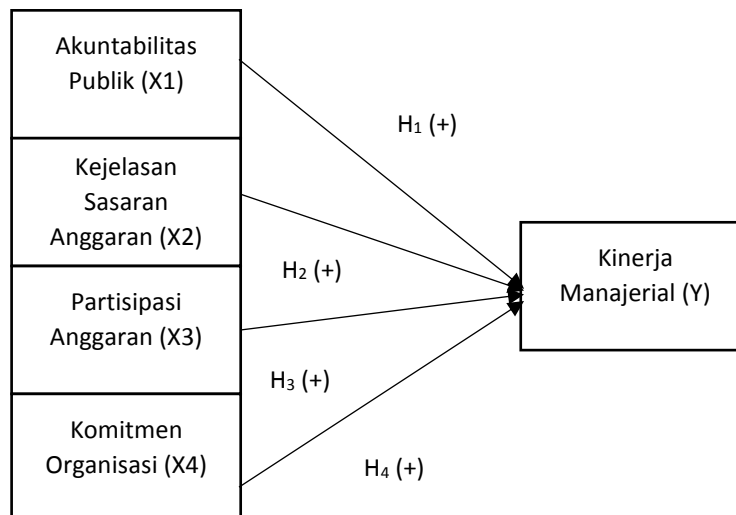
Beberapa literatur sebelumnya mengkonfirmasi bahwa kinerja manajerial dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu akuntabilitas publik (Febria dkk., 2021; Melia & Sari, 2019), kejelasan sasaran anggaran (Candrakusuma, 2017; Anderson 2016; Hariani & Alamsyah, 2018), partisipasi anggaran (Pakpahan, 2018; Suryani & Pujiono, 2020), dan komitmen organisasi (Tampubolon & Basid, 2019; Handayati & Safitri, 2020). Namun, Candrakusuma (2017), Jitmau dkk. (2017), Mulya dan Fauzihardani (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hariani dan Alamsyah (2018), Nazaruddin dan Setyawan (2016) juga menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Lebih lanjut, Precilia dan Mimba (2020) mengkonfirmasi bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi. Selain itu, Cantika dkk. (2021) menemukan hubungan negatif antara komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Adanya inkonsistensi hasil penelitian ini menyebabkan timbulnya kesenjangan sehingga kajian terkait hal ini perlu untuk ditelusuri lebih dalam.

Secara teoritis, pemerintah daerah memiliki tuntutan untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya sesuai peraturan yang berlaku. Pandangan tersebut kemudian memotivasi mereka untuk lebih melayani masyarakat dan bekerja secara maksimal (Amani & Halmawati, 2022). Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang mendeskripsikan bahwa *steward* tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi melainkan lebih terpaku untuk memaksimalkan kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Dalam teori *stewardship*, pemerintah yang bekerja sebagai *steward* akan bertindak secara bersama-sama atau berkelompok. Lebih lanjut, pemerintah sebagai pihak yang memiliki informasi lebih khususnya di bidang keuangan diharapkan mampu menghadirkan transparansi kepada masyarakat sesuai dengan harapan dan keyakinan yang dimiliki oleh pemerintah (Awwaliyah dkk., 2019). Berangkat dari pandangan tersebut, pemerintah sebagai *steward* akan lebih berfokus untuk memberikan yang terbaik dan berperilaku sejalan sesuai kebutuhan organisasi (Kiswanto dkk., 2020).

Sejalan dengan pembahasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Secara eksplisit, penelitian ini merupakan hasil replikasi dari kajian terdahulu oleh Melia & Sari (2019) yang kemudian dimodifikasi dengan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel independen. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berkontribusi menambah referensi dan literatur terkait kajian kinerja manajerial terkhusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah agar dapat lebih mendalami dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial terutama akuntabilitas publik dan

komitmen organisasi. Dengan demikian, diharapkan kinerja manajerial dimasing-masing daerah di Indonesia dapat lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan model penelitian seperti yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan survei dan pendekatan kuantitatif dengan maksud untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada masing-masing responden. Penelitian berfokus di wilayah Kabupaten Magelang tepatnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari tiga badan dan tujuh belas dinas. Secara spesifik, pemilihan Kabupaten Magelang tidak luput dari hasil evaluasi kinerja Pemkab Magelang yang turun secara berturut-turut dalam kurun waktu lima tahun. Oleh sebab itu, penting untuk digali indikator penyebab dari tidak maksimalnya pembangunan serta banyaknya kegiatan yang belum terealisasi di wilayah ini. Lebih lanjut, penelitian mengadopsi teknik *purposive sampling* dalam menentukan unit *sampling* (responden). *Purposive sampling* sendiri adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yakni para pejabat struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang yang terdiri dari Kepala Badan/Dinas/Kantor, Kepala bagian/bidang/subdinas/, Kepala subbagian/subbidang/ seksi dan Sekretariat/sekretaris. Penetapan kriteria didasari dengan relevansi dan keterkaitan responden dengan pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Hal ini dimaksudkan agar responden memiliki kemampuan yang memadai dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner.

Sejumlah 85 kuesioner berhasil disebarkan secara bertahap di SKPD Kabupaten Magelang dalam kurun waktu dua puluh tujuh hari. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, ditemukan hanya 81 kuisisioner yang dikembalikan. Seluruh kuesioner yang kembali diisi dengan lengkap oleh responden. Dengan demikian, 81 kuisisioner dapat digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan data statistik karakteristik responden yang menampilkan rincian identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jabatan.

Tabel 1 Data Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	50	62
Perempuan	31	38
Usia		
21 - 35 tahun	20	25
36 - 50 tahun	43	53
>50 tahun	18	22
Pendidikan Terakhir		
SMA	11	13
D3	7	9
S1	50	62
S2	13	16
Pengalaman Kerja		
< 1 tahun	8	10
1 – 5 tahun	29	36
6 – 10 tahun	21	26
> 10 tahun	23	28
Jabatan		
Kepala Kantor/Badan/Dinas	5	6
Kepala Bidang/Bagian	39	48
Kepala subbidang/subbagian/seksi	30	37
Sekretaris	7	9

Instrumen penelitian ini diadopsi dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu: kinerja manajerial oleh Hasnani *et. al.*, (2016), akuntabilitas publik oleh Wahyuni *et. al.*, (2014), kejelasan sasaran anggaran oleh Locke dan Lathan (1984) dan Putra (2013), partisipasi anggaran oleh Haryadi (2012), dan komitmen organisasi oleh Putri (2013). Masing-masing variabel diukur menggunakan skala likert satu sampai lima. Angka satu menyatakan “Sangat Tidak Setuju” dan angka lima mengindikasikan “Sangat Setuju”. Hal ini umum dijalankan dalam studi dengan pendekatan survei bidang akuntansi sektor publik di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan metode SEM (*structural equation modelling*) berbasis *Partial Least Square* (PLS) melalui aplikasi *SmartPLS v.3.0* sebagai alat untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan antar variabel serta mengkonfirmasi teori. Penggunaan PLS cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan ukuran sampel yang relatif kecil (Nitzl, 2016). Alasan lain dari penggunaan PLS-SEM adalah karena penelitian ini lebih berfokus dalam menguji hubungan antar variabel daripada melihat kecocokan model penelitian (Sofyani dkk. 2022). Menurut Hair, Hult, Ringle, dan Sarstedt (2021), penggunaan PLS memerlukan setidaknya tiga tahapan yang terdiri dari spesifikasi model, evaluasi *outer models*, dan evaluasi *inner model*.

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan analisis data dan pembahasan yang komprehensif. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan analisis deskriptif terlebih dahulu. Analisis ini dilakukan dengan uji statistik deskriptif

yang memperlihatkan simpulan teoritis dan aktual. Hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kinerja manajerial, akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi memiliki nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel mempunyai gambaran informasi yang tinggi.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Std. Dev	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual		
			Min	Max	Mean	Min	Max	Mean
Kinerja Manajerial	81	5,040	9	45	27	17	45	36,72
Akuntabilitas Publik	81	4,810	9	45	27	15	45	35,04
Kejelasan Sasaran Anggaran	81	3,811	7	35	21	13	35	27,02
Partisipasi Anggaran	81	2,192	5	25	15	15	25	20,54
Komitmen Organisasi	81	3,580	7	35	21	11	35	29,07

Selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas melalui uji *outer loading* (Tabel 3). Uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Menurut (Hair, Hult, Ringle, dan Sarstedt, 2014) jika indikator konstruk memiliki nilai *loading* kurang dari 0,5 maka disarankan untuk menghapusnya karena nilai *loading* yang lemah akan berpengaruh pada *Cronbach's Alpha* dan *Average Variance Extracted* (Hair et al., 2021). Berangkat dari argumen tersebut, dilakukan dua kali pengujian. Pengujian pertama menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai *outer loading* dibawah 0,5. Namun, setelah pengujian kedua seluruh peraturan dalam pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan realibilitas telah terpenuhi.

Berikutnya adalah hasil pengujian validitas diskriminan yang disajikan pada Tabel 4. Dalam pengujian melalui pendekatan PLS, validitas diskriminan biasanya dinilai menggunakan kriteria Fornell-Lacker. Sejalan dengan hal tersebut, validitas diskriminan dinyatakan terpenuhi apabila akar kuadrat dari AVE untuk suatu konstruk memiliki korelasi lebih besar untuk dirinya sendiri dari pada konstruk lain (Fornell & Larcker, 1981).

Selain itu, Uji reabilitas dilakukan dengan maksud untuk mengetahui konsistensi indikator dalam mengukur konstruk. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas *Cronbach's Alpha* dan *Composite* masing-masing lebih besar dari 0,6 dan 0,7 (Chin, Marcolin, & Newsted, 2003; Hair et al., 2014). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, serta dapat dilakukan pengujian hipotesis.

Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 6. Hasil tersebut menunjukkan akuntabilitas publik dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Akan tetapi, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis diketahui bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Artinya bahwa semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam SKPD Kabupaten Magelang, maka akan semakin meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas publik yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akutualisasi akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Magelang. Secara spesifik, pertanggungjawaban aparatur pemerintah dalam hal ini implementasi akuntabilitas publik akan mempermudah masyarakat dalam memahami realisasi anggaran dan belanja pemerintah. Jika realisasi anggaran disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Benawan dkk. (2018); Wahyudi dkk. (2019); Febria dkk.

(2021); Melia & Sari (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Indikator	Memuat
<i>Akuntabilitas Publik (AP) - AVE: 0,674</i>	
AP 2	0,662
AP 5	0,894
AP 6	0,827
AP 7	0,894
AP 8	0,762
AP 9	0,861
<i>Kinerja Manajerial (KM) - AVE: 0,706</i>	
KM 1	0,768
KM 2	0,809
KM 3	0,861
KM 4	0,695
KM 5	0,900
KM 6	0,895
KM 7	0,898
KM 8	0,894
KM 9	0,819
<i>Komitmen Organisasi (KO) - AVE: 0,654</i>	
KO 1	0,756
KO 2	0,888
KO 3	0,826
KO 4	0,762
KO 5	0,855
KO 6	0,901
KO 7	0,642
<i>Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) - AVE: 0,561</i>	
KSA 1	0,737
KSA 2	0,824
KSA 3	0,869
KSA 4	0,716
KSA 5	0,640
KSA 6	0,716
KSA 7	0,715
<i>Partisipasi Anggaran (PA) – (AVE): 0,559</i>	
PA 1	0,663
PA 2	0,689
PA 3	0,828
PA 4	0,688
PA 5	0,851

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini mungkin terjadi apabila pemimpin SKPD yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran tidak senantiasa berprinsip untuk memberikan yang terbaik dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika demikian, maka pencapaian target anggaran bagi aparatur tersebut tidak menjadi penting lagi atau tidak mempengaruhi kinerja mereka. Terlebih lagi, dalam konteks pemerintahan sektor publik terdapat unsur politik sehingga pemenuhan sasaran anggaran tidak menjadi factor utama keberhasilan anggaran saja melainkan adanya muatan politik dalam anggaran sektor publik (Suryani &

Pujiono, 2020). Dengan demikian, adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran ataupun tidak disesuaikan dengan kondisi instansi dan pemimpinnya. Temuan ini sejalan dengan beberapa riset terdahulu yang dikemukakan oleh Precilia dan Mimba (2020), Saraswati (2019), Suryani dan Pujiono (2020)

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Diskriminan (Fornel & Lacker)

	Akuntabilitas Publik	Kejelasan Sasaran Anggaran	Kinerja Manajerial	Komitmen Organisasi	Partisipasi Anggaran
Akuntabilitas Publik	0,821				
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,694	0,749			
Kinerja Manajerial	0,754	0,583	0,840		
Komitmen Organisasi	0,667	0,565	0,666	0,809	
Partisipasi Anggaran	0,218	0,122	0,254	0,197	0,748

Tabel 5 Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Konstruk	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Publik	0,901	0,925
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,874	0,898
Kinerja Manajerial	0,947	0,956
Komitmen Organisasi	0,910	0,929
Partisipasi Anggaran	0,834	0,863

Selanjutnya, hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal tersebut karena pada saat proses penyusunan anggaran dilakukan, manajer tingkat menengah dan bawah tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan dan hanya memberikan informasi mengenai keadaan dilapangan yang dapat mendukung proses penyusunan anggaran. Kurangnya keterlibatan dalam penganggaran tersebut menyebabkan manajer tingkat menengah dan bawah kurang memahami anggaran dan merasa kurang produktif sehingga menyebabkan kinerja manajer rendah dan kinerja manajerial SKPD ikut rendah. Jawaban responden atas pertanyaan dalam kuesioner mengenai partisipasi anggaran menunjukkan ketidaksetujuan, hal ini menunjukkan rendahnya partisipasi dari manajer terhadap suatu anggaran yang dapat berdampak terhadap kinerja menjadi rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018), Hariani dan Alamsyah (2018), Nazaruddin dan Setyawan (2016) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Tabel 6 Result of Inner Weights

	Code	Original Sample (O)	t-Statistics	p-Values	Conclusion
Akuntabilitas Publik → Kinerja Manajerial	H ₁	0,509	3,643	0,000	Supported
Kejelasan Sasaran Anggaran → Kinerja Manajerial	H ₂	0,065	0,598	0,275	Not Supported
Partisipasi Anggaran → Kinerja Manajerial	H ₃	0,082	1,219	0,112	Not Supported
Komitmen Organisasi → Kinerja Manajerial	H ₄	0,274	1,752	0,040	Supported

Lebih lanjut, hasil dari pengujian hipotesis mengindikasikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Artinya bahwa komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen yang tinggi membuat

individu lebih peduli organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha membuat organisasi lebih baik lagi, sehingga terdapat pengaruh positif dari komitmen organisasi terhadap kinerja. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi semakin tinggi kinerja yang dicapai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon & Basid, (2019), Handayati & Safitri (2020), Candrakusuma dkk. (2017), Sari dan Yogantara (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Terlepas dari temuan tersebut, penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini menawarkan studi empiris dalam mengeksplorasi hubungan akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Disisi lain, penelitian ini sejalan dengan *stewardship theory* dalam konteks pemerintah sebagai *steward* yang lebih termotivasi untuk berfokus pada pencapaian sasaran organisasi dari pada tujuan-tujuan individu. Adapun secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada aparatur pemerintah daerah untuk dapat lebih memahami dan mengimplementasikan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja mereka terutama akuntabilitas publik dan komitmen organisasi. Dengan pemahaman dan aktualisasi aspek tersebut, diharapkan aparatur daerah mampu meningkatkan kinerja manajerialnya dan mencapai tujuan organisasi.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa akuntabilitas publik dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, pertama adalah ruang lingkup penelitian yang terbatas yakni hanya pada wilayah Kabupaten Magelang. Oleh sebab itu, pembaca perlu berhati-hati terutama dalam mengeneralisasikan hasil dalam konteks yang lebih luas. Kedua, penelitian ini membuat dan mengembangkan kuesioner dari penelitian sebelumnya sehingga terdapat beberapa pernyataan yang masih bersifat bias. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yang mencakup wilayah lebih luas. Lebih lanjut, penelitian selanjutnya dapat menambahkan pendekatan dengan teknik wawancara langsung pada masing-masing responden agar data yang diperoleh dapat lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Amani, F., & Halmawati, H. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial pada Perhotelan di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 299–310. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.528>
- Amir, A., Ridwan, R., Din, M., Yamin, N., Zahra, F., & Firman, M. (2021). The role of budget participation in improving managerial performance. *Accounting*, 7(2), 269-280. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.12.004>
- Augustine, A. A. (2022). Budgeting Techniques and Budgetary Control in Local Governments: Participatory Budgeting a Critical Instrument for Sustainable Development. *International Journal Of Management And Economics Invention*, 8(11), 2682-2693. <https://doi.org/10.47191/ijmei/v8i11.02>
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research—Vol*, 1(1). [10.21580/jiafr.2019.1.1.3745](https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745)

- Beerli, I., Uster, A., & Vigoda-Gadot, E. (2019). Does performance management relate to good governance? A study of its relationship with citizens' satisfaction with and trust in Israeli local government. *Public Performance & Management Review*, 42(2), 241-279. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1436074>
- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(03), 72-79. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.19995.2018>.
- Candrakusuma, D. A., & Bambang Jatmiko. (2017). Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 87-93.
- Cantika, S., Mukhzarudfa, M., & Zulma, G. W. M. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 628-635. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1518>
- Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. R. (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. *Information systems research*, 14(2), 189-217. <https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Precilia, N. P. E., & Mimba, N. P. S. H. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kohesivitas Kelompok terhadap Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2381-2391. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p16>
- Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. D. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 37-44. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/3648>
- Fuadah, L. L., Safitri, R. H., Yuliani, Y., & Arisman, A. (2020). Determinant Factors' Impact on Managerial Performance through Management Accounting Systems in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 109-117. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.109>
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106-121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hariani, S., & Alamsyah, V. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Skpd Walikota Jakarta Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 11(2), 273-283. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.008>
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122-139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Hasnani, L., Taufik, T., & Haryani, E. (2016). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengawasan Fungsional dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 16-30. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/10159>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231-246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Jatmiko, B., Laras, T., & Rohmawati, A. (2020). Budgetary participation, organizational commitment, and performance of local government apparatuses. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 379-390. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.379>
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 276-285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Kempa, J., & Kozłowski, A. R. (2020). Participatory Budget as a Tool Supporting the Development of Civil Society in Poland. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 13(1), 61-79. <https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0003>

- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Lazty Mahera, Y. (2020). Factors Influencing the Weaknesses of Internal Control of Local Governments in Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 122–129. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8118>
- LKjIP. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Magelang 2020*. 59. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Lorenzo, E., Paguio, D., & R. Asio, J. M. (2021). Budget Allocation System of a Highly Urbanized Local Government Unit in Central Luzon, Philippines. *International Journal of Humanities, Management and Social Science*, 4(2), 39–50. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ij-humass-0402.283>
- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068–1079. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.128>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Nazaruddin, I., & Setyawan, H. (2016). The Effect of Budgetary Participation on Performance of Local Government Officials with Organizational Culture, Organizational Commitment, Motivation, Decentralization, and Job Relevant Information as Moderation Variables. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 197–207. doi: <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/684>
- Nitzl, C. (2016). The use of partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) in management accounting research: Directions for future theory development. *Journal of Accounting Literature*. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2016.09.003>
- Pakpahan, R. V. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Pangaribuan, D., & Lecturer. (n.d.). *Functionally Publik Accountability, Management Control Systems and Organizational Culture to Increase Organizational Performances*.
- Handayati, P., & Safitri, B., P., A. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kota Batu. *Journal of Publik and Business Accounting*, 1(01), 1–19. <https://doi.org/10.31328/jopba.v1i01.82>
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial dengan Job Relevant Information sebagai Variabel Pemoderasi (Survey pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 2(2), 30–37. <https://doi.org/10.35141/jraj.v2i2.517>
- Sari, N. K. I., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Accounting Departement Hotel Bintang 5 di Kabupaten Bandung. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 02(1), 106–115. <https://doi.org/10.51713/jarac.v2i1.27>
- Setyoko, P. I., & Kurniasih, D. (2022). SMEs Performance During Covid-19 Pandemic and VUCA Era: How the role of Organizational Citizenship Behavior , Budgetary, Participation and Information Asymmetry? *International Journal of Social and Management Studies (Ijosmas)*, 3(4), 105–116.
- Sofyani, H., & Ardiyanto, I. (2022). Determinan Kinerja Manajerial Pemerintah Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 149–165. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.18424>
- Sofyani, H., Tahar, A., & Ulum, I. (2022). The role of IT capabilities and IT governance on accountability and performance of higher education institutions during the COVID-19 pandemic. *Management and accounting review*, 21(2), 167–190.
- Suryani, F., & Pujiono, P. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 167–181. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1516>
- Syah, M. A. (2021). Accountability in publik administration. *Journal of Administrative Science*, Vol.5, Iss(January).
- Wahyudi, A., Ngumar, S., & Suryono, B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Perangkat Desa (Studi Pada Perangkat Desa Di Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.815>
- Wahyuni, R., Rasuli, M., & Diyanto, V. (2014). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi empiris pada

- SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 1–73.
- Yuliansyah, Y., Triwacananingrum, W., Mohd-Sanusi, Z., & Said, J. (2019). Enhancing the task performance of bank employees: Relevance of trust, self-efficacy, and budget participation. *International Journal of Business Excellence*, 17(4), 397–413. <https://doi.org/10.1504/ijbex.2019.10020541>